



PERAN MEDIA MASSA DALAM SEKURITISASI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Angga Nurdin Rachmat^{1*}

¹Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Jenderal Achmad Yani; Indonesia

*email: angga.nurdin@lecture.unjani.ac.id

Abstract

The securitization process of the Covid-19 pandemic in Indonesia will involve various actors related to securitizing actors and functional actors. By emphasizing the role of mass media as functional actors in the process of securitization, this research will discuss the role of the mass media in the securitization process of the Covid-19 pandemic in Indonesia. The main argument in this research is based on the securitization theory to analyze the mass media's role as functional actors in the securitization process of the Covid-19 pandemic. This research uses qualitative methods with data collected through literature studies to be analyzed by grouping text data to reveal the implied meaning of the construction of the threat from Covid-19 by securitizing actors. This research found that the mass media took three roles in the process of securitizing the Covid-19 pandemic in Indonesia, which are a place for actors to exist, mechanisms for securitizing actors to initiate speech acts, build and maintaining situations.

Keywords: *funcional actor, policy, speech act, threat*

Abstrak

Proses sekuritisasi pada pandemi Covid-19 di Indonesia akan melibatkan berbagai aktor, baik terkait dengan *securitizing actors* maupun *functional actors*. Dengan mengangkat peran dari *functional actors*, yakni media massa dalam proses sekuritisasi, penelitian ini akan membahas bagaimana peran media massa dalam proses sekuritisasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Argumen utama dalam penelitian ini berlandaskan teori sekuritisasi dengan tujuan menganalisis peran media massa sebagai *functional actors* pada proses sekuritisasi pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan untuk dianalisis dan mengelompokkan data teks untuk mengungkap makna yang tersirat mengenai konstruksi ancaman dari Covid-19 oleh *securitizing actors*. Penelitian ini menemukan media massa mengambil tiga peran dalam proses sekuritisasi pandemi Covid-19 di Indonesia, yakni sebagai wadah eksistensi bagi para aktor, mekanisme *securitizing actors* memulai *speech act*, membangun dan memelihara situasi.

Kata Kunci: aktor fungsional, ancaman, kebijakan, *speech act*

Pendahuluan

Status pandemi Covid-19 telah membawa perubahan tidak hanya pada sistem kesehatan, tetapi juga pada perilaku sosial masyarakat. Krings et.al (2021: 199) menyebutkan bahwa masa pandemi telah memunculkan ancaman terhadap perilaku dan sikap masyarakat. Kondisi ini didasarkan pada kebijakan yang diambil oleh sebagian besar pemerintah untuk menempatkan Covid-19 sebagai ancaman. Tidak terkecuali pemerintah Indonesia, yang meskipun pada awalnya hanya melihat sebagai permasalahan kesehatan. Namun, pada perkembangannya juga menempatkan Covid-19 sebagai sebuah ancaman yang memerlukan penanganan darurat. Pandemi Covid-19 sendiri telah diposisikan sebagai sebuah ancaman, khususnya pada level individu manusia (Nurhasanah et al., 2020).

Posisi pandemi Covid-19 sebagai sebuah ancaman yang tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada seluruh aspek kehidupan manusia. Hal tersebut menimbulkan upaya dari berbagai negara yang bersifat kedaruratan dalam rangka mencegah penyebarannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengedepankan aspek kedaruratan yang tercermin dalam berbagai kebijakan penanggulangan Covid-19, seperti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan protokol kesehatan maupun program vaksinasi dengan tujuan perubahan perilaku masyarakat (Tiffany, 2020). Di sisi lain bukti adanya sekuritisasi terhadap pandemi Covid-19 juga dilihat dari aspek hubungan luar negeri Indonesia di era pandemi (Arifin, 2020). Lebih spesifik, Basundoro dan Karunia (2021) melakukan komparasi dalam anatomi sekuritisasi yang terjadi di Indonesia dan Pakistan. Bagi pemerintah Indonesia, sekuritisasi ditujukan untuk membangun *sense of crisis* di tengah masyarakat sehingga berbagai kebijakan penanggulangan Covid-19 bertujuan membentuk kepatuhan masyarakat tanpa adanya penolakan yang akan tercermin dari perubahan perilaku masyarakat.

Upaya membangun *sense of crisis* akan mendapatkan tantangan serius karena sebelum terjadinya pandemi, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah cenderung rendah sebagai akibat dari polarisasi masyarakat dan kekuatan politik pascapemilu 2019 dan isu korupsi di tubuh pemerintah (Agustino, 2021: 64). Berdasarkan data *Deep Knowledge Group* (2020), Indonesia berada pada kelompok negara peringkat keempat sebagai kelompok negara terburuk dalam penanganan

pandemi. Artinya bahwa masyarakat tidak memberikan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah dan kebijakan dalam penanganan pandemi. Meskipun, fakta menunjukkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Covid-19 dapat dilihat dari empat cara, yakni melalui strategi promotif, preventif, kuratif, dan juga melalui bantuan sosial. Kesuksesan strategi ini memerlukan peran aktif dari masyarakat (Mietzner, 2020). Sementara itu, Wahidah et.al (2020) juga melihat PSBB maupun cara hidup baru (*new normal*) yang memerlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut juga dianggap berhasil diterapkan.

Berdasarkan fenomena tersebut, Peneliti meyakini bahwa terdapat sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pandemi Covid-19 tidak terlepas dari aktor lain yang berperan. Peneliti melihat bahwa media massa di era pandemi berperan besar dalam menjembatani pemerintah sebagai *securitizing actors* dan masyarakat sebagai *audience*. Hal ini didasarkan pada beberapa penelitian mengenai kaitan antara media dengan proses sekuritisasi. Keberadaan media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses sekuritisasi, di samping kelompok oposisi dan institusi peradilan (Watson, 2009). Media tradisional (cetak dan televisi) maupun media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk opini publik dalam rangka sekuritisasi (Vultee, 2011). Vultee (2007), Dolinec (2010), dan Qadri (2020) dalam penelitiannya memberikan perhatian pada keterlibatan media dalam sekuritisasi dengan melihat bagaimana terorisme dibingkai dalam pemberitaan media untuk dijelaskan dan diorganisir sebagai sebuah ancaman. Di sisi lain, Schafer et.al (2016) meneliti mengenai tren dari laporan media massa di 9 negara mengenai sekuritisasi dalam isu lingkungan, khususnya terkait perubahan iklim. Sementara Gaufman (2015) menjelaskan peran media Rusia yang berkaitan dengan ancaman fasisme merupakan sebuah legitimasi Rusia untuk terlibat dalam krisis di Ukraina. Sementara Hass (2009) melihat media dan sekuritisasi maupun de-sekuritisasi pada kondisi konflik melalui kemampuan untuk membangun opini publik melalui informasi yang disampaikannya.

Berdasarkan pemaparan mengenai fenomena sekuritisasi Covid-19 di Indonesia dan keterlibatan media massa dalam proses sekuritisasi terhadap isu selain pandemi yang telah dipaparkan sebelumnya, tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan “bagaimana media massa berperan dalam proses sekuritisasi Covid-19 di Indonesia?”. Berdasarkan pertanyaan tersebut penelitian ini menyajikan argumen utama bahwa

media massa berperan untuk mendorong sekuritisasi sebagai wahana bagi para aktor sekuritisasi baik *securitizing actors* maupun *functional actors* lainnya, memperluas jangkauan *speech act*, serta membangun kesadaran atas urgensi isu terhadap masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memperkuat posisi media massa sebagai *functional actors* dalam proses sekuritisasi pada isu pandemi Covid-19 di Indonesia. Melalui analisis kualitatif terhadap pemberitaan mengenai pandemi Covid-19 dan kebijakan pemerintah Indonesia di media massa, baik cetak maupun elektronik pada era pandemi, diperoleh pemahaman mengenai peran media massa sebagai *functional actors* dalam teori sekuritisasi.

Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi terhadap pandemi Covid-19 didasarkan pada kerangka analisis dalam memahami keamanan yang dikemukakan para ahli dari *Copenhagen School*. Sekuritisasi sendiri merujuk pada Buzan (1998: 23-24) merupakan sebuah upaya yang lebih ekstrem dari politisasi terhadap sebuah isu sehingga mengemuka sebagai isu dalam ranah keamanan. Dalam hal ini sekuritisasi berarti membangun sebuah legitimasi untuk menghadapi atau menangani pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan keamanan. Memahami proses sekuritisasi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para aktor yang terlibat, yakni *securitizing actors*, *audience*, dan *functional actors* (Buzan et al., 1998: 36). *Securitizing actors* merupakan aktor yang memiliki legitimasi untuk menunjukkan apa yang harus dilindungi dan dari ancaman apa (*referent object*) yang dibawa melalui *speech act*. Sementara *audience* adalah mereka yang memberi legitimasi bagi *securitizing actors* untuk menjadikan sebuah isu sebagai isu keamanan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Terakhir adalah *functional actors* merupakan aktor yang berada dalam dinamika dalam sektor keamanan, posisinya akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan dalam bidang keamanan.

Aspek penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam sekuritisasi dan media massa adalah *speech act*. Saifudin (2019) memberikan penjelasan sederhana mengenai *speech act* yang merupakan sebuah kegiatan dengan menggunakan bahasa agar orang lain melakukan sebuah tindakan yang diinginkan oleh yang melakukan *speech act* tersebut. Pada konteks sekuritisasi *speech act* merupakan kegiatan verbal dari *securitizing actors* untuk menunjukkan ancaman dan apa yang sedang berada dalam

kondisi terancam kepada *audience* sebagai upaya membangun legitimasi bagi *securitizing actors* untuk melakukan tindakan tertentu (*extraordinary measure*) dalam rangka mengatasi ancaman yang mengemuka (Waeber, 2007: 73). Dengan demikian maka *speech act* akan berisikan berbagai retorika yang dikemukakan oleh *securitizing actors* untuk membangun kesadaran adanya permasalahan yang memerlukan kebersamaan dalam menghadapinya. Oleh karena itu, keberhasilan dari sekuritisasi yang dilakukan pada konteks pandemi Covid-19 di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bagaimana *speech act* ini dilakukan dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Keberadaan atau analisis terhadap *functional actors* tidak jarang diabaikan dalam sebuah analisis mengenai sekuritisasi. Sebagaimana yang telah disampaikan pada awal tulisan, sebagian besar analisis mengenai sekuritisasi memberikan perhatian lebih kepada tindakan *securitizing actors* melalui *speech act*. Padahal, *functional actors* sendiri pada sebuah proses sekuritisasi akan memberikan kontribusi ataupun menentang, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada desain atau munculnya isu keamanan. *Functional actors* di sini tidak berada dalam posisi sebagai pelaku sekuritisasi (*securitizing actors*) maupun *referent object* (Buzan et al., 1998: 36). Dengan demikian, keberadaan dan peran dari *functional actors* dalam sebuah proses sekuritisasi tidak dapat dikesampingkan, meskipun masih terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi *functional actors* dalam sebuah proses sekuritisasi, mengingat banyaknya aktor yang dapat memainkan peranan ini.

Beranjak dari uraian diatas, Floyd (2020: 9–10) memberikan lima penekanan terhadap karakteristik *functional actors* dalam proses sekuritisasi pada berbagai isu yakni; pertama, *functional actors* merupakan individu atau kelompok yang berusaha untuk mendapatkan pengaruh/perhatian dengan mengemukakan isu sekuritisasi, baik dalam sisi positif maupun sisi negatif. Kedua, *functional actors* akan dapat menggagalkan atau mempromosikan sekuritisasi meskipun mereka bukan merupakan *referent object* ataupun yang menjadi terancam, singkatnya mereka melawan atau mendorong sekuritisasi atas dasar kepentingan atau mewakili aktor lain. Ketiga, *functional actors* tidak menjadi pihak yang memulai atau melakukan pencegahan dini terhadap sekuritisasi, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain; meskipun demikian mereka akan memberikan pandangan dalam proses sekuritisasi yang telah

berjalan. Keempat, beberapa *functional actors* berada pada sektor yang spesifik, namun ada pula *functional actors* yang berada pada berbagai sektor. Kelima, jumlah dari *functional actors* akan meningkat seiring dengan kondisi kebebasan yang ada di dalam masyarakat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, peneliti melihat keberadaan media sebagai *functional actors* dalam sekuritisasi dapat merujuk pada penjelasan Floyd (2020: 10), yaitu sebagai kendaraan atau instrumen untuk *functional actors* lain untuk dikenal dan didengar, bahkan dalam hal ini media menjadi *functional actors* paling kuat dalam proses sekuritisasi. Sejalan dengan Hass (2009) yang menyebutkan bahwa terdapat 3 peran media dalam proses sekuritisasi, yakni pertama, menyediakan panggung bagi *securitizing actors* melakukan *speech act*. Kedua, saluran untuk memulai *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actors*. Ketiga, melakukan fungsi pengawasan saat gerakan sekuritisasi ini telah dimulai. Dengan demikian, kontribusi media dalam proses sekuritisasi menempatkannya dalam kategorisasi Floyd (2020) sebagai *gatekeeper*. Media menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sebagai *audience* yang mampu secara aktif mengatur apa yang akan menjadi pengetahuan publik, menampilkan informasi yang menjadi prioritas dan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut. Dengan demikian maka dalam fungsi sebagai *gatekeeper*, media akan digunakan untuk mendorong sekuritisasi, termasuk memperkuat argumen mengenai pentingnya isu tersebut dan juga untuk mempertahankan justifikasi, serta legalisasi dari sekuritisasi yang dilakukan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah metode kualitatif. Pemilihan metode kualitatif merujuk pada Creswell (2014: 23-25) sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah dari sebuah fenomena kompleks, seperti dalam proses sekuritisasi karena sifatnya yang multidisiplin, paradoks, dan dilematis. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analisis Sugiyono (2018: 3) untuk membangun deskripsi mengenai peran dari media massa melalui pemberitaan sebagai mekanisme penyaluran *speech act* dari *securitizing actors* kepada *audience* terkait pandemi Covid-19 maupun kebijakan pemerintahan Indonesia.

Data yang digunakan untuk mendukung argumen utama pada penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dari berbagai buku, jurnal maupun pemberitaan media massa mengenai fenomena sekuritisasi, serta perilaku para aktor yang terlibat dalam proses sekuritisasi tersebut dalam rangka menggali data yang menunjukkan peran media di dalamnya. Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Creswell (2014, p. 247) dengan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar dari pemberitaan yang memuat berbagai pernyataan dari *securitizing actors* maupun sudut pandang pemberitaan mengenai Covid-19 dan kebijakan penanggulangannya. Validasi data yang digunakan dalam penelitian ini melakukan triangulasi (Boije, 2014, p. 176) dengan memeriksa data yang diperoleh mengenai pernyataan *securitizing actors* mengenai Covid-19 maupun kebijakan penanggulangannya yang dimuat dalam pemberitaan media massa.

Pendekatan Keamanan Pada Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19.

Covid-19 yang disebabkan oleh Virus SARS-Cov-2 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) pada Maret 2020 sebagai pandemi global. Saat WHO menyatakan sebagai pandemi, setidaknya dalam 2 minggu jumlah kasus infeksi di luar China telah bertambah 13 kali lipat dan jumlah negara yang mengalami penyebaran penyakit ini telah meningkat 3 kali lipat (Cucinotta & Vanelli, 2020). Hingga tahun 2021 setelah 18 bulan pandemi terjadi, tidak ada satu negara pun yang bisa menghindar atas penyebaran virus penyebab Covid-19, terlebih dengan berbagai mutasi dari virus ini semakin memperluas penyebaran secara global. WHO sebagai otoritas kesehatan internasional mendorong semua negara melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran penyakit ini.

Covid-19 pada perspektif keamanan telah mengemukakan ancaman baru bagi manusia seiring dengan meningkatnya kepanikan, ketakutan, serta ketidakberdayaan masyarakat secara global dalam skala yang cukup besar. Bagi banyak negara pilihan yang kemudian ditempuh, termasuk Indonesia meskipun dengan metode yang berbeda adalah dengan melakukan penutupan berbagai jalur masuk ke negaranya dalam rangka mencegah penyebaran virus tersebut (Piliang, 2020). Kebijakan ini tentu ditujukan sebagai bagian untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berada di

negaranya. Kebijakan-kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 merupakan bagian dari *extraordinary measure* yang akan menunjukkan ciri bahwa telah terjadi sekuritisasi dalam isu tersebut. *Extraordinary measure* akan menunjukkan urgensi dari isu yang dihadapi dan membangun *sense of crisis* di tengah masyarakat yang akan melegitimasi tindakan maupun kebijakan *securitizing actors*.

Extraordinary measure akan ditujukan sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi ancaman yang muncul terkait dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang dilakukan oleh *securitizing actors*. Buzan et.al (1998) menyebutkan bahwa dalam mengatasi ancaman, segenap kekuatan dan sumber daya akan dikerahkan dalam rangka mengatasi ancaman yang mengemuka, dalam hal ini adalah dari penyebaran Covid-19. Dasar hukum dari pemerintah Indonesia dalam menerapkan *extraordinary measure* ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 mengenai pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara sebagai dasar operasional adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 mengenai pentahapan Covid-19 sebagai darurat kesehatan (Basundoro & Karunia, 2021). Implementasi pada konteks operasional tercermin pada dikeluarkannya berbagai pedoman, serta prosedur terkait dengan protokol kesehatan dalam berbagai bidang oleh berbagai kementerian terkait. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan pengalihan anggaran untuk digunakan dalam penanganan Covid-19, serta pemulihan ekonomi dengan total Rp 695,2 Triliun pada tahun 2020 dan alokasi untuk 2021 sebesar Rp 774,75 Triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Operasionalisasi berbagai kebijakan terkait dengan upaya menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia telah melibatkan berbagai aparat keamanan hingga melibatkan institusi militer. Keterlibatan militer dalam penanganan Covid-19 disebut oleh Taufika (2020) sebagai bentuk militerisasi dari penanganan Covid-19 di Indonesia, yang ditunjukkan melalui Keterlibatan personel maupun berbagai sumber daya yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelibatan militer dalam penanganan Covid-19 di Indonesia menunjukkan tingkat urgensi dari penanganan krisis yang akan menjadi ancaman terhadap bangsa dan negara. Meskipun pelibatan tersebut tidak melanggar aturan karena merupakan bagian dari peran Operasi Militer Selain Perang TNI yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, pelibatan

TNI dalam penanganan Covid-19 menunjukkan upaya untuk membangun *sense of crisis* dari masyarakat.

Sense of crisis ini mengemuka sebagai bagian dari tujuan untuk menerapkan disiplin di kalangan masyarakat Indonesia yang diposisikan sebagai kunci dalam penanganan pandemi. Dengan demikian, tujuan dari sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah untuk membangun kesadaran atas ancaman yang dapat diatasi melalui kedisiplinan dari masyarakat (Tifany, 2020). Bahkan pada bulan April 2020, pemerintah Indonesia kemudian menerapkan penutupan wilayah melalui skema Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19. Meskipun kemudian penerapan PSBB ini berdampak terhadap melambatnya sektor ekonomi. Bagi Indonesia, sekuritisasi juga terkait dengan dilema yang dihadapi dalam rangka menjamin sistem demokrasi. Berkaca pada beberapa kasus, negara otoriter menjadikan krisis akibat Covid-19 sebagai momentum untuk memperkuat kekuasaan mereka atas masyarakatnya, sementara negara demokrasi seperti Indonesia berusaha untuk melakukan penyeimbangan atas upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan akibat Covid-19 dengan berbagai aspek kebebasan masyarakat (Hutabarat et al., 2020: 64). Meskipun demikian, pendekatan keamanan yang digunakan melalui tindakan represif menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dihindarkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia saat menegakkan berbagai aturan dalam rangka pencegahan Covid-19 telah merujuk pada upaya pengerdilan ruang sipil (Kirana, 2020).

Kebijakan lain pada konteks internasional yang kemudian mengemuka adalah pengetatan pintu masuk bagi kedatangan orang asing di Indonesia, serta penerapan berbagai prosedur terhadap perjalanan orang, baik pada ranah domestik maupun internasional. Di samping itu, pada konteks hubungan luar negeri, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memberikan penekanan dalam rangka menjalin kerja sama untuk memperoleh bantuan medis, serta mengamankan akses terhadap ketersediaan vaksin dengan berbagai negara dan organisasi internasional (Arifin, 2020: 26). Dengan demikian, kepentingan nasional sebagai prioritas adalah untuk memberikan bantuan terhadap warga negara yang berada di negara yang terkena Covid-19 di luar negeri dan upaya untuk mengamankan akses terhadap ketersediaan vaksin dari berbagai negara (Setiawan, 2020). Kondisi ini telah menunjukkan adanya pergeseran prioritas

yang kemudian dilakukan oleh Indonesia dalam menjalankan kebijakan luar negeri sebagai bagian dari upaya untuk menangani pandemi yang terjadi di dalam negeri. Dengan demikian, urgensi penanganan pandemi menjadi tujuan utama dalam rangka menyelamatkan masyarakat Indonesia, baik yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri.

Pembahasan: Peran Media Massa dalam Sekuritisasi Covid-19 di Indonesia.

Media Massa Sebagai Wahana bagi Eksistensi Para Aktor Sekuritisasi

Pada proses sekuritisasi yang terjadi terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia, media massa memainkan peranan dengan menyediakan panggung bagi *securitizing actors* maupun *functional actors* lain untuk menyampaikan *speech act* (Hass, 2009: 84). Peranan ini tidak dapat dilepaskan dari kemampuan media massa yang merupakan salah satu mekanisme sangat efektif dalam penyebaran informasi. Hal ini didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh Kraus & David (1975) bahwa media mengambil bagian dalam membangun realitas [politik] di dalam masyarakat. Terlebih jika merujuk pada *speech act* yang merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman masyarakat terhadap apa yang menjadi ancaman dan objek yang tengah berada dalam ancaman, maka akan diperoleh legitimasi untuk mengeluarkan berbagai tindakan/kebijakan dalam rangka mengatasi ancaman tersebut (Waeber, 2007: 73). Dengan demikian, upaya para aktor dalam proses sekuritisasi terhadap pandemi Covid-19 memerlukan dukungan dari saluran yang mampu untuk membawa pesan dalam *speech act* tersebut kepada *audience* akan disediakan oleh media massa. Seiring dengan demokratisasi dan kebebasan pers di Indonesia, media massa akan menjadi sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan maupun informasi kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, peran media tradisional maupun non-tradisional tidak dapat dikesampingkan dalam penyebaran informasi mengenai Covid-19 kepada masyarakat, selain informasi yang disampaikan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai otoritas kesehatan dunia (Leach & Dry, 2010). Sejalan dengan Anggraini & Saptatia (2021) media massa memiliki peran yang tidak dapat dikesampingkan sebagai instrumen untuk melakukan komunikasi bagi pemerintah kepada seluruh *audience*, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat umum dengan menyalurkan berbagai informasi terkini mengenai kondisi penanganan maupun

pencegahan. Kondisi ini memungkinkan bagi *securitizing actors* maupun *functional actors* untuk senantiasa menyampaikan berbagai *speech act* yang bertujuan untuk membangun *sense of crisis* dengan tujuan merekayasa perilaku masyarakat sebagai bagian dari penanganan ancaman yang berasal dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Fakta dapat ditemukan pada awal pandemi terjadi, saat pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 senantiasa menyampaikan berbagai informasi mengenai Covid-19 termasuk angka statistik perkembangan penyebarannya di Indonesia yang ditayangkan setiap hari pada salah satu stasiun TV swasta.

Floyd (2020: 10) menyebutkan bahwa media merupakan kendaraan untuk *securitizing actors* dan berbagai *functional actors* untuk dikenal dan didengar. Kondisi ini dapat dilihat dari bagaimana munculnya berbagai ahli yang menyampaikan pendapat maupun analisis pada berbagai program Televisi mengenai Covid-19 dalam bidang masing-masing. Bahkan beberapa TV swasta nasional memberikan segmen khusus dalam siaran berita dan menyiarkan laporan khusus terkait dengan Covid-19 di Indonesia dalam bentuk berita, khususnya dalam hal ini adalah dialog dengan para pakar atau ahli tersebut. Pemerintah, baik Presiden maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, epidemiolog, dokter spesialis, dan lain sebagainya menyampaikan pandangan maupun analisis terkait dengan Covid-19 yang disiarkan melalui media massa, khususnya TV. Pada konteks media non-tradisional pun informasi mengenai Covid-19 senantiasa menjadi *trending* dan mendominasi informasi yang berada di dunia maya.

Berdasarkan uraian tersebut, media massa dalam proses sekuritisasi sebagai aktor yang berusaha untuk mendapatkan pengaruh/perhatian dengan mengemukakan isu sekuritisasi, baik dalam sisi positif maupun sisi negatif (Floyd, 2020: 9). Pengaruh maupun perhatian ini akan diperoleh dengan menampilkan berbagai aktor yang melakukan diskursus terhadap Covid-19, baik terkait dengan sifat dari penyakit ini hingga kebijakan-kebijakan yang harus diambil maupun telah diambil dalam rangka menangani pandemi ini. Namun di sisi lain, terjalin hubungan saling menguntungkan di antara *securitizing actors* dan *functional actors* lain yang menjadikan media massa sebagai instrumen sekuritisasi tersebut. Media massa akan memperoleh keuntungan dari perhatian para *audience* khususnya terkait dengan *rating* maupun iklan yang ditayangkan selama program yang terkait dengan pembahasan Covid-19 tersebut

sementara *securitizing actors* memperoleh wahana untuk mendesiminasikan *speech act* dan *functional actors* lain akan memperoleh panggung untuk menunjukkan keahlian mereka dalam bidang yang terkait dengan Covid-19.

Media Massa sebagai Mekanisme bagi Securitizing Actors Memulai Speech Act

Hass (2009) mengemukakan bahwa media massa memiliki peran dalam rangka memulai *speech act* oleh *securitizing actors*. Berdasarkan argumen tersebut, pada kasus sekuritisasi Covid-19 di Indonesia, media massa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *securitizing actors*, yang dalam hal ini adalah Presiden Indonesia Joko Widodo. Media menjadi mekanisme yang digunakan dalam memberikan informasi awal mengenai kondisi yang terjadi serta perkembangan dari penyebaran Covid-19 di Indonesia. Pengumuman awal dari masuknya Covid-19 di Indonesia tersebut dibuat melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengundang berbagai media, baik cetak dan elektronik pada tanggal 3 Maret 2020 bertempat di Istana Negara, Jakarta. Isi dari pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah memberikan pernyataan mengenai evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Tiongkok untuk menghindari penyebaran Covid-19 di negara tersebut, sekaligus mengkonfirmasi mengenai terdeteksinya infeksi Covid-19 di Indonesia untuk pertama kali serta langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di Indonesia (Ihsanudin, 2020).

Pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menaati protokol kesehatan. Informasi ini dapat dimaknai sebagai pesan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi permasalahan yang akan dihadapi dalam beberapa waktu ke depan. Meskipun pada pernyataan tersebut tidak memberikan penekanan dalam membangun *sense of crisis* dari masyarakat, kondisi ini dipahami sebagai upaya untuk menghindarkan kepanikan yang berpotensi terjadi. Penggunaan media massa dalam penyampaian informasi oleh pemerintah bukan merupakan hal yang pertama kali dilakukan. Namun, dalam konteks sekuritisasi terkait pandemi Covid-19 ini adalah bagaimana pesan awal tersebut disampaikan oleh Presiden sebagai *securitizing actor*. Keberadaan media massa tidak dapat dilepaskan dari kesadaran mengenai daya jangkauan dari media massa memungkinkan pesan untuk ditangkap oleh kalangan luas sehingga mampu

memberikan edukasi mengenai bagaimana cara menghindari dan mencegah penularan penyakit tersebut (Abraham, 2007).

Keberadaan media massa dalam proses sekuritisasi yang dilakukan oleh *securitizing actors* dan *functional actors* lain terkait dengan cakupan yang dapat menjangkau banyak orang yang menjadi ciri khas (McQuail, 2010: 62). Dengan demikian, posisi media dalam proses sekuritisasi Covid-19 adalah sebagai alat untuk mempromosikan sekuritisasi, meskipun mereka bukan merupakan *referent object* atau yang berada dalam posisi terancam. Singkatnya, media massa mendorong sekuritisasi atas dasar kepentingan atau mewakili aktor lain (Floyd, 2020: 9). Terlebih dengan kemampuan untuk menjadi instrumen komunikasi massa dalam rangka menyampaikan konten simbolis kepada masyarakat umum dan bersifat tersebar (Janowitz, 1968). Konten simbolis ini akan merujuk pada *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actors* dalam rangka membangun legitimasi atas kondisi serta kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, media massa tidak menjadi pihak yang memulai atau melakukan pencegahan dini terhadap sekuritisasi, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain (Floyd, 2020: 9). Pernyataan ini dapat dimaknai bahwa media massa berada dalam posisi yang digunakan oleh aktor lain, khususnya *securitizing actors* untuk memulai proses sekuritisasi. Media massa dalam kaitan dengan proses sekuritisasi yang terjadi terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia menempati posisi yang strategis bagi para aktor yang terlibat dalam sekuritisasi dalam isu ini, baik pada konteks positif maupun negatif (sekuritisasi maupun de-sekuritisasi). Terlebih pada konteks pernyataan awal maupun berbagai pernyataan lain dari *securitizing actors* terkait dengan pandemi Covid-19 di Indonesia, media massa senantiasa memberikan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan informasi mengenai isu lainnya. Kondisi ini tentu akan menciptakan situasi dalam realitas sosial masyarakat mengenai kondisi krisis dari pandemi serta kebijakan pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap pandemi tersebut.

Media Massa Membangun dan Memelihara Situasi Krisis

Setelah sekuritisasi dimulai melalui *speech act* yang dilakukan oleh *securitizing actors* melalui media massa, selanjutnya media massa akan menjalankan peran dalam

mengawal proses sekuritisasi (Hass, 2009). Media dalam hal ini akan melakukan peliputan dan pemberitaan secara terus menerus terkait dengan berbagai informasi mengenai isu yang tengah disekuritisasi. Kondisi ini terjadi ketika media massa memberikan informasi dengan memilih sudut pandang dan preferensi mereka sendiri untuk diinformasikan kepada masyarakat. Pada konteks Indonesia, media massa memiliki kontribusi dalam cakupan liputan mengenai pandemi Covid-19 di Indonesia. Kondisi ini akan berkaitan dengan bagaimana narasi yang dibawa dalam kebijakan pemerintah memiliki hubungan dengan perubahan dari warna yang dibawa dalam peliputan media. Penelitian Apriliyanti et.al (2021) menyatakan bahwa media menjadi platform yang sangat berperan dalam mempengaruhi *agenda-setting* kebijakan, khususnya terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Uraian di atas menunjukkan bahwa media sosial merupakan bagian dari sebuah konstruksi sosial yang digunakan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat yang dijalankan sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Perubahan perilaku masyarakat ini tidak dapat dilepaskan dengan peran dari media massa dalam membangun dan memelihara situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Media massa mampu untuk memengaruhi konstruksi kognitif masyarakat melalui berbagai tayangan dan informasi mengenai Covid-19. Kondisi ini menghasilkan pengetahuan di kalangan masyarakat melalui narasi yang berasal dari media akan berdampak dengan menghadapi tingkat reflektif pada realitas subjektif yang ada berdasarkan pada pengalaman seseorang. Dalam beberapa tayangan senantiasa mengangkat cerita dari para penyintas Covid-19 maupun keluarga dari korban meninggal dunia akibat Covid-19. Media massa dalam konteks ini akan menjadi sarana penyampaian pesan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi situasi pandemi Covid-19, yang pada akhirnya akan mampu membuat masyarakat lebih beradaptasi dengan situasi sosial di era pandemi seperti saat ini (Akbar, 2021: 79)

Lebih jauh, Pieri (2019) melihat bahwa laporan yang diangkat oleh media massa serta edukasi yang diberikan dapat berkontribusi terhadap kesadaran masyarakat, kondisi ini menunjukkan bahwa media dapat merekayasa perilaku masyarakat (dalam arti positif maupun negatif) selama terjadinya pandemi. *Tagline* yang kemudian senantiasa digaungkan di media massa adalah “lindungi sesama”, kata lindungi dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya untuk mencegah datangnya ancaman berasal dari virus

penyebab Covid-19. Ancaman ini kemudian akan membangun *sense of crisis* di masyarakat Indonesia. *Sense of crisis* diharapkan akan menjadi katalisator perubahan perilaku masyarakat sebagai kesadaran atas kondisi yang tengah dihadapi sebagai agenda yang diusung oleh *securitizing actors*. Perubahan perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai penerimaan terhadap adanya situasi mengancam dalam skala masif yang berasal dari pandemi Covid-19 di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dari kata adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) sebagai sebuah standar perilaku keseharian masyarakat sesuai protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan mencuci tangan (Djalante et al., 2020: 7). Perubahan perilaku ini merupakan bagian dari upaya perlindungan diri terhadap ancaman pandemi Covid-19 termasuk kesadaran dan antusiasme masyarakat dalam program vaksinasi dimana pada awalnya banyak yang meragukan bahkan melakukan penolakan.

Keberadaan media massa dalam membangun dan memelihara situasi pandemi Covid-19 di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebebasan pers sebagai hasil dari proses demokratisasi. Media massa sebagai *functional actors* dalam sekuritisasi pandemi Covid-19 di Indonesia sangat beragam mulai dari media konvensional (televisi, koran, radio, dll) hingga platform di media sosial. Mengacu pada penjelasan Floyd (2020), kondisi ini menunjukkan apa yang dilakukan *functional actors* akan meningkat seiring dengan kondisi kebebasan yang ada di dalam masyarakat. Artinya semakin beragam media yang ada untuk mengusung informasi mengenai pandemi Covid-19, akan semakin terbentuk kondisi maupun suasana pandemi yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan meningkatkan kewaspadaan secara berkelanjutan dari virus penyebab Covid-19 di sekitar kita. Menghadirkan kewaspadaan dari masyarakat sebagai *audience* terhadap penyebaran Covid-19 ini dapat ditemukan dari berbagai informasi yang terkait dengan data statistik mengenai jumlah orang terkonfirmasi, sembuh maupun meninggal akibat penyakit ini yang menjadi tayangan rutin dari berbagai media di Indonesia di era pandemi ini.

Pembingkaiian terhadap keberadaan dari para tenaga kesehatan yang diberikan label dengan menggunakan diksi sebagai “garda terdepan”, “tentara” atau “pahlawan” pada berbagai pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam kondisi perang melawan Covid-19 (Djalante et al., 2020: 5). Pelabelan terhadap tenaga kesehatan yang meninggal karena terpapar Covid-19 ini pun disematkan “gugur”

dalam berbagai media massa, pelabelan ini senantiasa diberikan kepada mereka yang meninggal dalam medan pertempuran dalam membela negara. Pada satu sisi, ini merupakan bagian dari apa yang disebut dengan membangun dan memelihara *sense of crisis* agar masyarakat tetap berada dalam kondisi waspada untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19. Di sisi lain, penayangan yang dilakukan oleh media secara berulang terkait berbagai informasi mengenai Covid-19 yang jauh melebihi permintaan, memungkinkan terjadinya kekhawatiran di kalangan masyarakat sebagai *audience* dengan munculnya dampak secara psikologis (Liu & Liu, 2020: 3).

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam melakukan konstruksi sosial terhadap situasi dan perilaku masyarakat mengenai kondisi pandemi Covid-19. Informasi dan pesan yang ditayangkan secara terus menerus menjadi kekuatan yang hanya dimiliki oleh media massa, baik tradisional maupun non-tradisional. Dengan demikian, dalam kaitan dengan proses sekuritisasi dalam peran membangun serta mempertahankan situasi ini, media berada pada sektor yang spesifik sebagai ciri dari *functional actor* merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Floyd (2020: 10). Kondisi ini akan terkait dengan bagaimana media mampu untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Covid-19, baik bahaya yang ditimbulkan maupun upaya pencegahan serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kaitan dengan penanganan pandemi di Indonesia. Artinya pada situasi dan kondisi tersebut, kebijakan pemerintah akan memperoleh legitimasi dari masyarakat karena terbangunnya kesadaran bahwa kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk melindungi mereka dari ancaman yang berasal dari penyebaran Covid-19.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap pandemi Covid-19 yang tercermin dalam membangun *sense of crisis* dalam kebijakan penanggulangan Covid-19 di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran media massa. Pada kondisi polarisasi masyarakat dan penurunan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah sebelum pandemi, kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 akan sulit untuk diterapkan karena memerlukan kepatuhan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah. Sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berusaha untuk membangun *sense of crisis* dalam rangka

memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Proses sekuritisasi terhadap Covid-19 di Indonesia berdasarkan pembahasan pada penelitian ini tidak akan berhasil membangun *sense of crisis* tanpa adanya *functional actor* yakni media massa.

Pembahasan membuktikan argumen penelitian ini dengan menemukan 3 peran yang dijalankan oleh media massa sebagai *functional actor* dalam sekuritisasi pandemi Covid-19 di Indonesia, yakni pertama, sebagai wahana bagi *securitizing actors* yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan aktor lain yang memiliki pengaruh politik dalam pemerintahan Indonesia, serta *functional actors* lainnya seperti para epidemiolog, dokter, pengamat dan lain sebagainya. Kedua, dengan jangkauan yang luas, media massa menempatkan diri untuk memulai sebuah proses sekuritisasi dengan menyampaikan berbagai *speech act* maupun informasi lain yang terkait dengan Covid-19 kepada masyarakat. Ketiga, media massa menciptakan dan memelihara situasi yang menunjang keberlangsungan dari sekuritisasi sebagai sebuah konstruksi mengenai realitas sosial yang terjadi di masyarakat terkait dengan pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19. Tulisan ini melihat peran media dalam konteks teori sekuritisasi sehingga mengesampingkan analisis konten yang biasa digunakan dalam rangka melakukan analisis terhadap perilaku media. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengangkat peran media dalam penyebaran informasi maupun edukasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abraham, T. (2007). *Twenty-First Century Plague: The Story of SARS*. Jhon Hopkins University Press.
- Agustino, L. (2021). Policy Learning and Handling of Covid-19 in Indonesia. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 13(1), 62–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jt.v11i2.719>
- Akbar, S. (2021). Media Komunikasi Dalam Mendukung Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Komunikasi Massa*, 2(1), 73–82.
- Anggraini, R., & Saptatia, H. (2021). Peran Media Massa Inggris dan Jerman dalam Menginformasikan Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Komunikasi*, 4(1), 66–80.
- Apriliyanti, I. D., Utomo, W. P., & Purwanto, E. A. (2021). Examining the policy narratives and the role of the media in policy responses to the Covid-19 crisis in Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 15(1).
- Arifin, R. (2020). Proses Sekuritisasi Pandemi SARS-COV-2 (Covid-19) di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Asia*

- Pacific Studies*, 4(1), 15–32.
- Basundoro, A. F., & Karunia, L. A. (2021). Anatomi Sekuritisasi Pandemi Covid-19: Komparasi antara Pakistan dan Indonesia. *Jurnal Sentris*, 2(1), 1–20.
- Boije, H. (2014). *Analysis in Qualitative Research*. Sage.
- Buzzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security A New Framework for Analysis*. Lynne Reinner Publisher Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*. Sage.
- Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO Declares Covid-19 a Pandemic. *Acta Biomedica*, 91(1), 157–160.
- Deep Knowledge Group. (2020). *Covid-19 Regional Safety Assesment : Big Data Analysis 200 Countries and Region Covid-19 Safety Ranking and Risk Assessment*. <https://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/full-report.pdf>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiarti, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress In Disaster Science*, 6, 1–10.
- Dolinec, V. (2010). The Role of Mass Media in the Securitization Process of International Terrorism. *Political Sciences*, XIII(2), 8–32.
- Floyd, R. (2020). Securitisation and the function of functional actors. *Critical Studies on Security*, 00(00), 1–17. <https://doi.org/10.1080/21624887.2020.1827590>
- Gaufman, L. (2015). Memory, Media and Securitization: Russian Media Framing of the Ukrainian Crisis. *Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society*, 1(1), 141–174.
- Hass, R. (2009). The Role of Media in Conflict and Their Influence on Securitisation. *The International Spectator : Italian Journal of International Affairs*, 44(4), 77–91. <https://doi.org/10.1080/03932720903351187>
- Hutabarat, J. S., Krismonika, G., & Lofa, E. (2020). Medan Geopolitik Baru 5.0 Pasca Covid-19. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 43, 63–69.
- I, W., R, A., Hartono, N. F. ., Rafiqie, M. C. ., & Septiadi, M. . (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(3), 179–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jmo.v11i.3.31695>
- Ihsanudin. (2020). *Ini Pengumuman Lengkap Jokowi Soal 2 WNI Positif Corona*. Kompas.Com.
- Janowitz, M. (1968). The Study of Mass Communication. In *International Encyclopedia of the Social Sciences* (3rd ed., pp. 41–53). Macmillan Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *APBN untuk Prioritas Penanganan Kesehatan dan Perlindungan Kesejahteraan Masyarakat*. Kemenkeu.Go.Id.
- Kirana. (2020). *Pengkerdilan Ruang Sipil di Tengah Pandemi*. <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-3.pdf>
- Kraus, S., & Davis, D. (1975). *The Effects of Mass Communication on Political Behaviour*. Pennsylvania State University Press.
- Krings, V. C., Steeden, B., Abrams, D., & Hogg, M. A. (2021). Social attitudes and behavior in the Covid-19 pandemic: Evidence and prospects from research on group processes and intergroup relations. *Group Processes & Intergroup Relations*, 24(2), 195–200. <https://doi.org/10.1177/1368430220986673>

- Leach, M., & Dry, S. (2010). Science, Politics and Social Justice in Epidemic Accounts And Responses. In M. Leach & S. Dry (Eds.), *Epidemics: Science, governance, and social justice*. Routledge.
- Liu, C., & Liu, Y. (2020). Media Exposure and Anxiety During Covid-19: The Mediation Effect of Media Vicarious Traumatization. *International Journal of Environment Research and Public Health*, 17(4720), 1–16.
- McQuail, D. (2010). *Mcquail's Mass Communication Theory* (6th ed.). Sage.
- Mietzner, M. (2020). Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its Covid-19 Response. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 227–249. <https://doi.org/10.1177/1868103420935561>
- Nurhasanah, S., Napang, M., & Rohman, S. (2020). Covid-19 As a Non-Traditional Threat to Human Security. *Journal of Strategic Studies*, 3(1), 54–68.
- Pieri, E. (2019). Media Framing and the Threat of Global Pandemic: The Ebola Crisis in UK Media and Policy Response. *Sociological Research Online*, 24(1), 73–92.
- Piliang, Y. A. (2020). *Virus De-globalisasi*. Kompas.Id.
- Qadri, S. N. (2020). *Framing terrorism and migration in the USA: the role of the media in securitization processes*. University of Glasgow.
- Saifudin, A. (2019). Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Lite*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Schäfer, M. S., Scheffran, J., & Penniket, L. (2016). Securitization of Media Reporting on Climate Change? A Cross-National Analysis in Nine Countries. *Security Dialogue*, 47(1), 76–96. <https://doi.org/10.1177/0967010615600915>
- Setiawan, A. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerja Sama. *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2), 65–74.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Taufika, R. (2020). *The Militarization of Covid-19: Mixing Traditional and Non-Traditional Security* (DMRU-063-EN; CSIS Commentaries).
- Tiffany, C. C. (2020). Securitization on the Spread of Covid-19 in Indonesia. *Jurnal Politica*, 11(2), 127–142.
- Vultee, F. (2007). *Securitization as a Theory of Media Effect : Contest Over Framing of Political Violence*. University of Missouri-Columbia.
- Vultee, F. (2011). Securitization as Media Frame: What Happens When the Media “Speak Security.” In T. Balzacq (Ed.), *Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve2* (pp. 77–94). Routledge.
- Waeber, O. (2007). Securitization and Desecuritization. In B. Buzzan & L. Hansen (Eds.), *International Security*. Sage.
- Watson, S. D. (2009). The Securitization of Humanitarian Migration. In *The Securitization of Humanitarian Migration*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203876794>